***TERM OF REFERENCE***

**SEMINAR HUKUM DAN PUBLIKASI NASIONAL (SERUMPUN) KE-3 TAHUN 2021**

**“PEMBANGUNAN HUKUM BERKEADILAN DI ERA 5.0 DAN KEBIASAAN BARU”**

Bangka, 09 September 2021 (*Online*)

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 mendelegasikan bahwa Indonesia negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat)* yang tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), serta pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Makna yang terkandung dalam penegasan ini bahwa dalam negara Indonesia, penyelenggaraan negara tidak oleh dan tidak dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum harus menampilkan wibawanya, pertama sebagai sarana mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya dengan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara kemajuan lahir dan kepuasan batin, dan kedua sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkeadilan.

Pembangunan hukum telah menjadi suatu bidang dan mempunyai posisi sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Dalam pembangunan hukum, dimana suatu keadaan yang menginginkan terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 serta memiliki budaya hukum yang berkualitas, namum tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum. Pembangunan hukum juga harus mangacu pada wawasan nusantara, yang berarti seluruh kepuluan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dimana hanya ada satu hukum nasional untuk kepentingan nasional yang berintikan keadilan. Pembangunan di bidang hukum juga arus memperkuat ketahanan nasional sehingga semakin kokoh dalam segala aspek kehidupan bangsa yaitu dalam kehidupan politik, ekonomi, social budaya, dan pertananan nasional.

GBHN 1993 menyatakan bahwa salah satu prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang dalam penyelenggaran pembangunan nasional adalah asas hukum yaitu, bahwa setiap warga negara dan penyelnggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, seerta negara yang diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Dalam Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) sampai dengan akhir maret, salah satu bentuk untuk memperoleh keadilan telah disusun berbagai perangkat peraturan perndang-undangan, diantaranya 239 undang-undang, 1.060 peraturan pemerintah, 1.561 keputusan presiden, 252 instruksi presiden, dan sejumlah penelitian hukum serta naskah akademik peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum dalam PJP I telah melahirkan landasan yang kokoh bagi pembangunan hukum tahap selanjutnya. Pada Era *society* 5.0 ini, menjadi titik kebangkitan pembangunan hukum nasional yang tidak hanya mengakomodir kepentingan ideologi dan filosofis yang bersumber pada budaya asli bangsa Indonesia yaitu Pancasila, namun juga mampu mengakomodir kemajuan teknologi informasi sehingga lebih mudah beradaptasi.

Implikasi hal ini adalah semua bentuk manajemen nasional dikehendaki untuk dilandaskan pada hukum, tidak pada keputusan politik semata. Pada saat yang sama, hukum dan kekuasaan sering saling berhadap-hadapan, dan ini merupakan masalah klasik, tetapi pada saat suatu bangsa harus melakukan pembangunan, hubungan tersebut semakin menonjol, yakni pertukaran antara keduanya yang bersifat konflik semakin meningkat. Ini dapat dipahami karena pembangunan hakikatnya merupakan tindakan, dan tindakan membutuhkan ruang gerak yang besar. Dengan kata lain, pembangunan membutuhkan kebebasan yang lebih besar daripada yang diberikan oleh hukum yang bersifat mengikat (Satjipto Raharjo, 2009;8-9). Oleh Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta (2013; 35), hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

Di sisi lain, Pancasila sebagai ideologi negara dalam konteks Indonesia harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Begitupula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjadi landasan konstitusional wajib dipedomani dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Apabila melenceng dari keduanya, maka pada dasarnya arah pembangunan sudah mulai kehilangan “jiwa raga” dalam bernegara. Dengan kata lain, sudah kehilangan “ke-Indonesia-an”-nya.

Kirdi Dipoyudo (1996) menyatakan bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Secara eksplisit, pernyataan ini ingin menegaskan bahwa segala aspek pembangunan harus mengacu dan bertumpu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sementara itu, konstitusi sebagai sumber tertib hukum tertinggi dalam perundang-undangan Indonesia, secara lebih detail telah mengatur dengan tegas dan lugas bagaimana proses pembangunan itu harus dijalankan. Pada prinsipnya, semua harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 agar tujuan nasional dapat tercapai. Tujuan nasional sangat jelas, betapa kepentingan publik menjadi utama. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 ditegaskan *“Memajukan kesejahteraan umum”*, dan sila ke-5 Pancasila “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Pada tanggal 14 Juli 2019 di Sentul Interntional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 (lima) visi untuk Indonesia Maju, yakni pembangunan infrastruktur terus berlanjut, prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak dalam kandungan, permudah investasi untuk lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran. Sejalan dengan hal ini, di periode kedua kepemimpinannya, bersama Ma’ruf Amien, ada lima program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan pada pidato pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu. Lima program prioritas itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangun infrastruktur, deregulsi, penyederhanaan bikrokrasi, serta transformasi ekonomi.

Lebih khusus di bidang hukum, terhadap berbagai kendala regulasi bakal disederhanakan. Beberapa pihak berharap misi pemerintah di bidang hukum ini proses penegakan hukum berjalan secara bersih dan terpercaya. Selain itu, publik pun tentu berharap hal tersebut bisa direalisasikan, yakni hukum ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada (Hukumonline, 20 Oktober 2019). Masih dalam hal deregulasi, pemerintah di antaranya memutuskan untuk membuat sebuah undang-undang bermetodekan Omnibus Law, di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, RUU Perpajakan, dan sejumlah RUU lain yang dikatakan sudah dipersiapkan pula oleh pemerintah.

Langkah pemerintah dalam memadukan beragam aturan yang sudah pernah ada sebelumnya dalam satu wadah yang sama bermetodekan Omnibus Law umpamanya, ternyata mendapat reaksi yang beragam dari publik. Beberapa pihak misalnya melihat metode itu tidak cocok diterapkan di sistem hukum Indonesia yang selama ini secara praktik mengarah pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Di samping itu, lebih pada persoalan substantif, beberapa RUU Omnibus Law, ternyata berpotensi melahirkan persoalan baru, di antaranya mereduksi undang-undang yang sudah ada sebelumnya sehingga pengaturan menjadi kacau-balau, serta isinya yang dinilai hanya mengakomodasi kepentingan pihak tertentu saja. Ini hanya beberapa persoalan yang tampak oleh publik.

Apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah, dalam konteks reformulasi hukum harus didukung. Beragam persoalan yang kemudian muncul di tengah-tengah upaya itu adalah momentum di mana publik harus ikut terlibat aktif memberikan sejumlah kritik konstruktif, kritik yang sifatnya memberikan masukan dan membangun. Sebagai ilmu, hukum bukanlah bidang yang bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya, dibutuhkan kontribusi dari cabang ilmu yang lain dalam memperbaiki kualitas hukum sebagai norma. Hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta hasil kajian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan mutak diperlukan saat ini. Sebab, mencari formulasi hukum yang ideal demi mewujudkan cita-cita nasional, bukan perkara mudah. Perlu kehati-hatian langkah, ketelitian dan kejelian sebelum akhirnya tujuan itu dapat dicapai. Pada gilirannya, rakyat sebagai episentrum tujuan adanya hukum, dapat merasakan sekaligus keadilan, manfaat, dan kepastian di bidang hukum. Oleh karenanya, penting dilaksanakan sebuah forum akademis untuk mencari formulasi yang dimaksud.

1. **Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas tentang pembangunan hukum berkeadilan di era 5.0 dan kebiasaan baru dalam mewujudkan pembangunan menuju Indonesia yang maju, sekaligus memberikan rekomendasi atas dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum yang berkeadilan. Hal ini penting dilakukan di tengah-tengah upaya pemerintah melakukan proses pembangunan dengan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi. Sejumlah tantangan dan hambatan itu memerlukan suatu formulasi yang penting untuk dibahas secara bersama-sama, tidak hanya oleh para sarjana hukum tetapi juga oleh bidang-bidang ilmu yang lain supaya pembangunan yang dimaksud bisa menyisir seluruh aspek dan terintegrasi. Oleh karena, perlu adanya upaya pemahaman secara holistik terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan itu, agar tujuan menjadi negara maju dapat tercapai. Selain itu, diharapkan pula terbangunnya sinergitas antara kampus tempat para akademisi, para pemikir, peneliti, dan pengabdi dengan semua pihak dalam mewujudkan cita-cita mulia itu.

1. **Luaran Kegiatan**

Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) III 2021 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini di antaranya bertujuan untuk membahas tentang pembangunan hukum berkeadilan di era 5.0 dan kebiasaan baru. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada seluruh *stakeholders*, baik pemerintah (pusat maupun daerah), legislatif sebagai pembentuk undang-undang sebagai acuan dalam proses pembentukan norma baru atau proses revisi aturan yang terkait dan relevan, serta pihak-pihak yang erat kaitannya dengan persoalan pembaharuan hukum agar terciptanya cita hukum yang dapat mendukung proses pembangunan, terutama pada masa yang akan datang. Sementara itu, paper yang dikirimkan oleh peserta pada *call for paper* pun akan menjadi masukan secara substansi. Hasilnya akan dipublikasikan pada jurnal dan prosiding ber-ISBN.

1. **Bentuk Kegiatan**
2. **Seminar Nasional**

Seminar Nasional yang merupakan forum akademik pemerintah, pimpinan atau perwakilan perguruan tinggi, penegak hukum, kelompok masyarakat sipil (LSM/NGO), akademisi, peneliti, pemikir, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema, yakni “Pembangunan Hukum Berkeadilan Di Era 5.0 Dan Kebiasaan Baru.” Seminar dirancang sebagai forum menyampaikan pendapat dan gagasan serta membahas pendapat dan gagasan tersebut secara terbuka. Forum ini akan dihadiri pihak yang berkompentensi dan ahli di bidangnya.

1. ***Call for Paper* dan *Paralel Grup Discussion* (PGD)**

Pelaksanaan *call for paper* akan dikelompok dalam beberapa *chamber,* dalam kelompok akan dirancang peserta penulis yang disesuaikan judul tulisan agar para penulis dapat fokus memberikan masukan kepada penulis yang memaparkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil kajiannya untuk pendalaman dan perbaikan kajian. Penulis yang memaparkan diberikan waktu yang sudah ditentukan untuk dapat menjelaskan secara efektif dan jelas kepada penulis lain yang mendengarkan hasil kajian. Pemaparan dilaksanakan dengan dimoderatori yang telah ditujuk oleh kepanitiaan untuk mengatur kegiatan agar tertib. Adapun bidang kajian yang ikut dalam *call for paper* adalah

* + - 1. Bidang Hukum
      2. Bidang Sosial dan Politik
      3. Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata
      4. Bidang Ekonomi dan Bisnis
      5. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan
      6. Bidang Agraria, Pertanian dan Kelautan
      7. Bidang Sains dan Teknologi Terapan
      8. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa
      9. Bidang Kesehatan, dll yang relevan.

1. **Biaya Kontribusi Peserta Call for Paper**

Biaya kontribusi kegiatan ini, yakni sebagai berikut;

1. Peserta dari luar Kepulauan Bangka Belitung; Rp. 300.000,-
2. Peserta dari Kepulauan Bangka Belitung; Rp. 200.000,-
3. Peserta Mahasiswa; Rp. 100.000,-

*(Sudah termasuk sertifikat seminar nasional, sertifikat pemakalah, dan publikasi artikel. Biaya penerjemahan jika diterbitkan dalam bahasa asing menjadi tanggungjawab peserta)*

1. **Keynote Speaker & Narasumber**
2. **Keynote Speaker**

**Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A** Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(*“*Pembangunan Hukum Berkeadilan Di Era 5.0 Dan Kebiasaan Baru*”*).

1. **Narasumber**

Narasumber pada kegiatan seminar nasional, yakni guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan aparatur negara. Adapun materi yang disampaikan, yakni;

1. **Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S,H,. M.Hum**/ Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (“*Rekonstruksi Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Nasional*”).
2. **Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum**/ Ketua Komisi Yudisal RI (*“Pembangunan Hukum dalam Merawat Integritas Peradilan dan Etika Hakim”*).
3. **Irjen. Pol. Drs. Anang Syarif Hidayat**/Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *(“Perwujudan Pembangunan Hukum Berkeadilan; Pengalaman dan Tantangan Kepolisian Masa Kini dan Masa Depan”*).
4. **Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H**/Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung *(“Pembangunan Hukum dalam Pidana Pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”*).
5. **Peserta**
6. **Peserta Seminar Nasional**

Peserta seminar nasional merupakan undangan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pimpinan atau perwakilan perguruan tinggi, penegak hukum, kelompok masyarakat sipil (LSM/NGO), akademisi, peneliti, pemikir, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema. Para peserta *call for paper* secara otomatis juga merupakan peserta pada seminar nasional. Selain dan selebihnya merupakan peserta yang diundang khusus karena memiliki keterkaitan dengan temayang diangkat dalam seminar nasional. Para peserta seminar nasional akan diberikan sertifikat sebagai peserta.

1. **Peserta *Call for Paper* dan PGD**

Peserta *call for peper* dan *Paralel Group Discussion* (PGD) adalah para dosen, guru, praktisi, peneliti, pengabdi, pemikir, mahasiswa, dan lain sebagainya yang tertarik mengikuti kegiatan ini serta ingin memaparkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil kajian untuk selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding. Peserta *call for paper* yang mempresentasikan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil kajiannya pada sesi PGD akan diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta tersebut sudah memaparkan paper yang sudah dikirimkan ke panitia.

1. **Waktu dan Tempat Penyelenggaraan**

Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) III Tahun 2021 rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 09 September 2021 secara *online* via *Zoom Meeting.*

1. **Waktu Penyelenggaraan**

Kegiatan akan dilaksanakan pada:

1. Hari/ tanggal : Kamis/ 09 September 2021
2. Jam : 09.00 – 15.30 WIB
3. Tempat : Universitas Bangka Belitung
4. **Tahapan Pendaftaran Peserta**
5. Pendaftaran dan penyerahan makalah peserta *call for paper* 13 April s/d 21 Agustus 2021.
6. Formulir pendaftaran dan makalah dikirim ke alamat email [serumpunfhubb@gmail.com](mailto:serumpunfhubb@gmail.com) dengan subjek: Makalah<spasi>Serumpun3<spasi>2021<spasi>Nama, dengan menyertakan formulir pendaftaran
7. Apabila makalah yang dikirimkan diterima, akan ada email pemberitahuan dari panitia paling cepat 1 (satu) minggu setelah tanggal pengiriman makalah, beserta *Letter of Acceptance* (LoA) sebagai bukti penerimaan, termasuk petunjuk lebih lanjut yang harus diikuti oleh peserta.
8. Template formulir pendaftaran dan makalah dapat diunduh di laman <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>
9. **Ketentuan Penulisan Makalah**

Tata cara penulisan dan pengiriman makalah untuk Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) Ke-3 Tahun 2021 adalah sebagai beriku;

1. Makalah yang dikirim merupakan karya ilmiah original yang tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Makalah merupakan hasil penelitian, pengadian kepada masyarakat, pemikiran atau kajian dari bidang ilmu yang sudah ditentukan.
3. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 2000-4000 kata, tidak termasuk abstrak dan footnotes, kertas A4, jenis font Cambria, ukuran 12, spasi 1, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm.
4. Judul artikel spesifik dan tegas, maksimum 12 kata atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
5. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan isi kesuluruhan makalah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) yang ditulis dalam satu paragraf paling banyak 200 kata.
6. Kata kunci abstrak yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
7. Sistematika penulisan sebagai berikut;
8. Judul
9. Nama Penulis (disertai/ tidak disertai gelar)
10. Institusi penulis, alamat lembaga penulis, dan email penulis
11. Abstrak bahasa Indonesia, kata kunci bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, kata kunci bahasa Inggris
12. Pendahuluan (berisikan latar belakang masalah dan permasalahan yang akan diulas dalam bab pembahasan)
13. Metode (berisikan cara, teknik, proses dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan ulasan yang dituangkan dalam bagian pembahasan)
14. Pembahasan (berisikan ulasan sub tema yang dipilih secara jelas dan komprehensif)
15. Penutup (berisikan kesimpulan dan penutup)
16. Daftar pustaka
17. Tata cara penulisan catatan kaki (*footnotes*) sebagai berikut;
18. Penulisan catatan kaki (*footnotes*) dimulai satu tap setelah penulisan urutan angka.
19. Kutipan buku (nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, halaman kutipan);

Contoh;

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm. 2.

1. Kutipan jurnal (nama penulis, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman tulisan);

Contoh;

Dwi Haryadi, *Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 12, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 2048.

1. Kutipan makalah (nama penulis, judul makalah, nama/ forum kegiatan, tempat, tanggal, halaman kutipan);

Contoh;

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial*, Seminar Nasional dan Call for Paper “Pembangunan Nasional yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan Sosial” Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2019, FH UBB, 9 Septermber 2019, hlm. 1.

1. Kutipan media massa cetak (nama penulis, judul tulisan, nama media, tanggal)

Contoh;

Maria SW Sumardjono, *RUU Cipta Kerja dan Pertanahan*, Harian Kompas, Sabtu 22 Februari 2020.

1. Kutipan internet/ media online (nama penulis, judul tulisan, alamat portal, tanggal diakses);

Contoh;

Fajar Laksono Suroso, *(Kembali) Soal Putusan Pengadilan Vs Opini Publik*, *https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59daf381b2314/kembali-soal-putusan-pengadilan-vs-opini-publik-oleh--fajar-l-laksono/* , diakses pada tanggal 09 April 2020.

1. Tata cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut;

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga.

Dwi Haryadi, *Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 12, Nomor 1, Juni 2018.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial*, Seminar Nasional dan *Call for Paper* “Pembangunan Nasional yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan Sosial” Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2019, FH UBB, 9 Septermber 2019.

Maria SW Sumardjono, *RUU Cipta Kerja dan Pertanahan*, Harian Kompas, Sabtu 22 Februari 2020.

Fajar Laksono Suroso, *(Kembali) Soal Putusan Pengadilan Vs Opini Publik*, *https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59daf381b2314/kembali-soal-putusan-pengadilan-vs-opini-publik-oleh--fajar-l-laksono/* , diakses pada tanggal 09 April 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

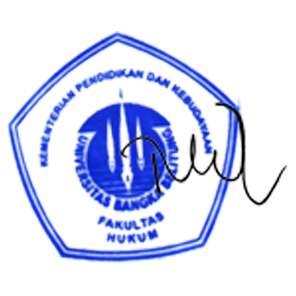
1. **Anggaran**

Kegiatan ini diselenggarakan dengan menggunakan anggaran RKA-KL/DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, serta biaya kontribusi peserta pada *call for paper*.

1. **Penutup**

Demikian *term of reference* ini disusun untuk acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Bangka, 10 Maret 2021**



Dekan, Ketua Pelaksana



Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. Rafiqa Sari, S.H., M.H

NIP. 198307172012121004 NIP. 198611012019032016